

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
KEPENGHULUAN (BPKep) DI KEPENGHULUAN SIARANG-ARANG
KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strara satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Siti Khodijah

NPM : 177110219

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Khodijah
NPM : 177110219
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-
Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kinerja metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing


Lilis Suriani.,S.Sos.,M.Si


Nurmasari.,S. Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Khodijah
Npm : 177110219
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan telah di nilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Serjana Starata Satu Bidang Ilmu Sosial.

Ketua

Pekanbaru, 9 Desember 2021

Sekretaris

Nurmasari, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani., S.Sos., M.Si

Anggota

Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Khodijah
Npm : 177110219
Program Studi : Adminstrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai dan telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Desember 2021

Ketua

Sekretaris

Nurmasari, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani., S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1

Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani , S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Administrasi Publik (S.Ap) pada program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki namun berkat adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karna itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafriadi, SH, MCL
Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Islma Riau.

3. Ibu Lilis Suryani S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Ibu Nurmasari S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penyusunan penulisan karya ilmiah penulis ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Teristimewa untuk yang tersayang kepada kedua orang tua, ayahanda Khairuddin S.Pd dan Ibunda Sumiati yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.
8. Buat Abang tersayang Aulia Muflih dan kakak tercinta Siti Aisyah S.Pd serta seluruh keluarga besar dan sepupu-sepupu yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Buat sahabat Firna jenni hotmauli, nurlina citra sari, prentin, siti barokah, Rismayani, Indah Siti Muharammah, Indriyani, Nanik Widyawati dan Untuk Feriandi Wibowo yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Buat teman-teman seangkatan Program Administrasi Publik Angkatan 2017.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini belumlah suatu kesempurnaan Namun penulis sudah berusaha segenap tenaga dan upaya yang ada untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Skripsi ini semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 17 Oktober 2021

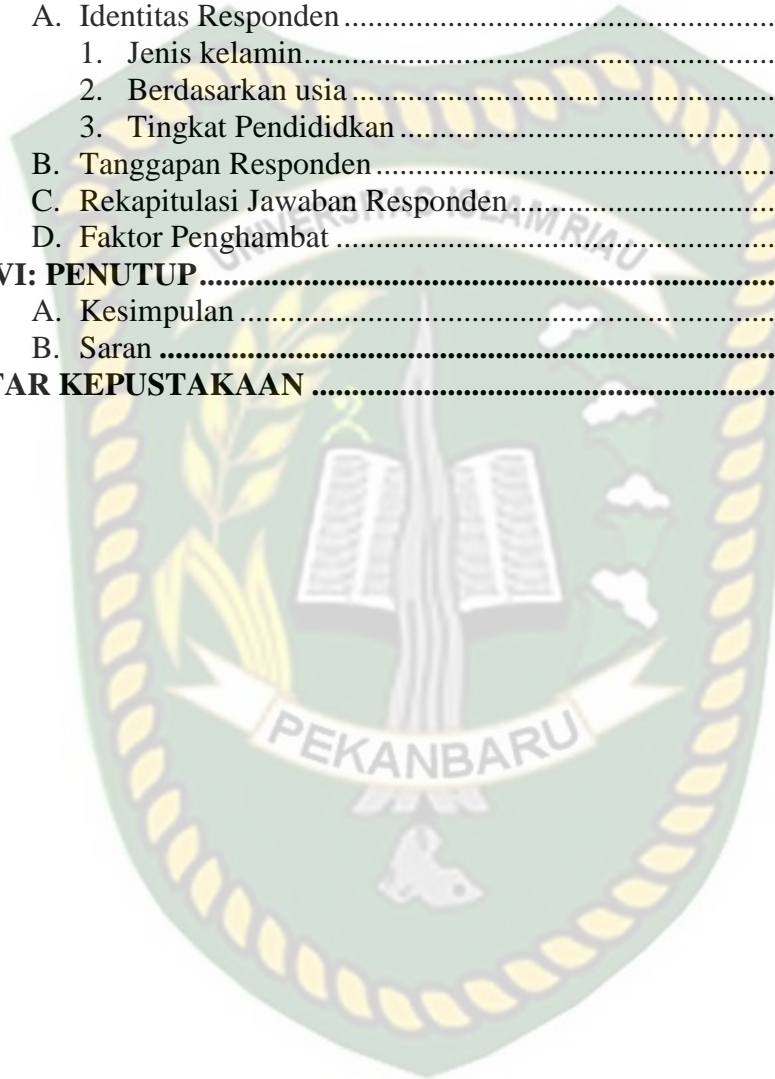
Penulis

Siti Khodijah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi	19
3. Konsep Manajemen	22
4. Konsep Fungsi	25
5. Konsep Pelaksanaan	26
6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	30
7. Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan	32
B. Kerangka Pikir	34
C. Konsep Operasional	35
D. Operasionalisasi Variabel	37
E. Teknik Pengukuran	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran umum lokasi penelitian	46
B. Gambaran Singkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir	48
C. Gambaran Umum Kepenghuluan Siarang-Arang	48
1. Jumlah penduduk	50

2. Agama dan kepercayaan.....	50
3. Mata Pencaharian	51
4. Pendidikan	51
D. struktur organisasi badan permusyawaratan kepenghuluan	52
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identitas Responden	54
1. Jenis kelamin.....	54
2. Berdasarkan usia	55
3. Tingkat Pendidikan	56
B. Tanggapan Responden	57
C. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	72
D. Faktor Penghambat	73
BAB VI: PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Pengurus Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang-Arang 2014-2020	7
I.2	: Peraturan-Peraturan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintahan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	9
I.3	: kegiatan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan Terhadap Usulan Masyarakat Kepenghuluan Siarang-Arang yang terlaksana 2016-2020.	10
I.4	: kegiatan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan Terhadap Usulan Masyarakat Kepenghuluan Siarang-Arang Yang Tidak Terlaksana 2016-2020.....	11
II.1	: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	37
III.1	: Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	43
III.2	: Perincian Kegiatan Penelitian Tentang “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	45
IV.1	: Jumlah Penduduk berdasarkan agama dan Kepercayaan	50
IV.2	: Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	51
IV.3	: jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	51
V.1	: jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	54
V.2	: Identitas Responden berdasarkan Umur.....	55
V.3	: Identitas Responden Berdsarkan Tingkat Pendidikan	56

V.4	: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Melaksanakan semua rencana	58
V.5	: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Kebijakan yang dirumuskan	62
V.6	: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan.....	66
V.7	: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam siapa yang melaksanakan	70
V.8	: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Daftar Kusisioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	82
2. : Daftar wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	89
3. : SK Dekan Fisipol UIR NO 1239/UIR-Fs/Kpts/2021 tentang penetapan dosen pembimbing penulisan skripsi A/n Siti khodijah	94
4. : Surat rekomendasi penelitian fakultas ilmu sosial dan ilmu politik no 1534/E-UIR/27-Fs/2021 tentang permohonan riset	95
5. : Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40963 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	96
6. : Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik No 070/Kesbangpol/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	97
7. : Surat Rekomendasi Riset Kantor Penghulu Siarang-Arang No 070/SK.P/SAA/V/2021/290 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	98
8. : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	99
9. : Rekapitulasi Telly Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	110

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khodijah
NPM : 177110219
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-
Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan



Siti Khodijah

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
KEPENGHULUAN (BPKep) DI KEPENGHULUAN SIARANG-ARANG
KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

SITI KHODIJAH

Kata Kunci: Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Dalam Pasal 1 Ayat 7 yaitu Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPKep itu sendiri ada tiga yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja Penghulu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan teori Westra dengan empat indikatornya yaitu melaksanakan semua rencana, kebijakan yang telah dirumuskan, melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, dan yang terakhir siapa yang akan melaksanakan. Penelitian ini terlaksana dengan menggunakan Tipe Survey Deskriptif Dengan Metode Kuantitatif yang mana menjelaskan keadaan sebenarnya yang didapat pada penelitian dan data yang diperoleh dijadikan acuan dalam menganalisa setiap indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampling sensus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, berikutnya jenis data yang penulis gunakan ialah data data primer dan data sekunder. Untuk hasil dari penelitian ini dari keseluruhan jawaban responden pada kusioner terletak pada kategori **Cukup Terlaksana**, akan tetapi dalam penelitian ini menurut penulis masih sangat banyak sekali yang harus di perbaiki pada pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dapat dilihat dari SDM yang kurang berkompeten dan sarana dan prasaranapun belum tersedia sehingga kinerja BPKep itu sendiri tidak menjadi efektif dan efisien.

**IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF THE PUJUD BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA (BPKep) IN KEPENGHULUAN
SIARANG-ARANG PUJUD DISTRICT ROKAN HILIR REGENCY**

ABSTRACT

SITI KHODIJAH

Key Words: Implementation, Kepenghuluan Consultative Body (BPKep)

*The Penghuluan Consultative Body (BPKep) in the Rokan Hilir Regency Regulation Number 11 of 2015 In Article 1 Paragraph 7, namely an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Penghuluan population based on regional representation which is determined democratically. There are three functions of BPKep, namely discussing and agreeing on the draft regulation on Penghulu with the Penghulu, accommodating and channeling the aspirations of the community, and monitoring the performance of the Penghulu. The purpose of this study was to find out more about the Implementation of the Functions of the Penghuluan Consultative Body (BPKep) in the Siarang-Arang Kepenghuluan, Pujud District, Rokan Hilir Regency. This study uses Westra's theory with four indicators, namely implementing all plans, policies that have been formulated, completing all the needs and tools needed, and finally who will implement it. This research was carried out using a Descriptive Survey Type with a Quantitative Method which explains the actual situation obtained in the research and the data obtained is used as a reference in analyzing each variable indicator used in this study. Then the sampling technique used is the census sampling technique, and the data collection techniques used are observation, questionnaires, interviews, and documentation, the next type of data that the author uses is primary data and secondary data. For the results of this study, all respondents' answers to the questionnaire were in the **Sufficiently Implemented** category, but in this study, according to the author, there is still a lot that must be improved in the implementation of the Functions of the Penghuluan Consultative Body. available so that the performance of BPKep itself does not become effective and efficient.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah sering mendengar kata administrasi dan ini bukanlah satu hal yang baru, baik dalam aspek kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan berorganisasi serta bermasyarakat. Bahkan secara sadar maupun tidak sadar kita telah melakukan kegiatan administrasi, menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli 2005; 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah, yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Organisasi sebagai wadah atau tempat dalam melakukan aktifitas kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau dengan melakukan visi yang telah direncanakan maka misi akan tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan semula. Dalam organisasi, struktur sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan atau aktifitas kerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para instansi yang ujung tombaknya adalah pegawai atau staf. Menurut Dwight Waldo (dalam Siagian 2006; 52) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Manajemen Menurut Siagian (2003;5) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki

manejerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam definisi ini, manajemen dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang jelas.

Pelaksanaan atau implementasi merupakan sebuah usaha-usaha yang dilaksanakan guna mewujudkan semua rangkaian rencana kebijaksanaan didalamnya yang telah ada proses perumusan didalamnya, dan didalamnya dilengkapi segera sektor mulai dari siapa yang melaksanakan rencana tersebut, dimana tempat merealisasikan pelaksanaannya, dan bagaimana tahapan yang harus dilaksanakan. Menurut Nurdin Usman (2002; 70) pelaksanaan merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, jumlahnya pun lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampe Marauke, sehingga tidak mungkin segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya pemerintah daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah didaerah masing-masing.

Keberadaan pemerintah daerah mendapat landasan yuridis dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Ayat (1) disebutkan: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah;daerah provinsi, dan

daerah kabupaten dan kota mempunyai daerah pemerintahan sendiri”. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu.

Kehadiran Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan otonomi daerah.

Sesuai konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Makna Desa Pada Undang-Undang No 06 Tahun 2014 adalah, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2014 Bab II Pasal 6 tentang

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa di Wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 tahun 2015 pada Bab I pasal 1 yang berbunyi “Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah kepenghuluan yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Pemerintah kepenghuluan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karna itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur

kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan permusyawaratan kepenghuluan dengan penghulu mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat kepenghuluan tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berkedudukan lebih tinggi, dimana badan permusyawaratan kepenghuluan mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Penghulu Kepada Bupati. Sementara penghulu tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat kepenghuluan tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat kepenghuluan, penghulu harus meminta persetujuan kepada BPKep. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan kepenghuluan dengan pemerintah kepenghuluan adalah mitra, artinya antara BPKep dan Penghulu harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan kepenghuluan dan APB kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai tugas konsultatif dengan Penghulu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan, selain itu badan permusyawaratan kepenghuluan juga berkewajiban untuk membantuk memperlancar pelaksanaan tugas penghulu.

Tugas, fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dijelaskan pada pasal 9,10, dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep).

Pasal 9 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berfungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama penghulu
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja penghulu.

Pasal 10 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu
- b. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian penghulu
- c. Membentuk panitia pemilihan penghulu
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan .

Pasal 11 Badan permusyawaratan kepenghuluan berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan kepada pemerintah kepenghuluan;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan;
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dari penjelasan diatas bahwasanya diketahui bahwa tugas badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) adalah dalam hal pengawasan, oleh karna itu Badan Permu syawaratan Kepenghuluan sebagai perpanjang tangan dari masyarakat harus bisa dilakukan fungsi pengawasan dengan baik-baik.

Berdasarkan Tiga dari Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini penulis hanya membatasi fungsi yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam menjangkau aspirasi masyarakat hanya pada saat adanya Musrembang.

Kepenghuluan Siarang-arang merupakan salah satu kepenghuluan yang ada di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, memiliki 5 dusun. Di Dikepenghuluan Siarang-Arang mayoritas pekerjaan masyarakatnya ialah petani dan nelayan. Penduduk Kepenghuluan Sarang-Arang berasal dari berbagai Daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kepenghuluan siarang-arang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Adapun Fungsi dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Adapun Pengurus Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang-Arang Sebagai berikut:

Table 1.1 : Pengurus Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang-Arang 2014-2020

No	Nama	Jabatan
1	Lindrayani	Ketua
2	Sukirno	Wakil Ketua
3	Iswanto HSB	Sekretaris
4	Wakidi	Anggota
5	Romiadi	Anggota
6	Imus	Anggota
7	Aziz B	Anggota

8	Supriadi	Anggota
9	Sarno	Anggota

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Peran Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sangatlah penting didalam pemerintahan kepenghuluan, karena BPKep merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur pemerintah kepenghuluan dan pengembangan pembangun kepenghuluan. Keberadaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam pemerintahan kepenghuluan adalah bukti melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi kepenghuluan, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah mufakat.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sebagai Penyelenggara pemerintahan kepenghuluan sebagai mana dijelaskan Fungsi dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Harus mampu memberikan kontribusi yang baik agar apa yang menjadi fungsi dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun peraturan Kepenghuluan dalam jenis APBKep yang telah dikeluarkan Pemerintah Kepenghuluan di kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.2: Peraturan-Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kepenghuluan di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kepenghuluan	Bentuk	Nomor Dan Tahun	Tentang
1	2	3	4	5
	Siarang-Arang	Peraturan Kepenghuluan	02 Tahun 2016	➤ Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
			02 Tahun 2017	➤ Anggaran Pendapatan dan belanja kepenghuluan
			02 Tahun 2018	➤ Anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan
			02 Tahun 2019	➤ Anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan
			02 Tahun 2020	➤ Anggaran Pendapatan dan belanja kepenghuluan

Sumber: Kantor Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2021

Berdasarkan tabel diatas dimana peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kepenghuluan Siarang-arang dalam peraturan kepenghuluan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan yang harus direncanakan oleh Penghulu bersama dengan BPKep yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan kepenghuluan.

Fungsi BPKep sebagai penyalur spirasi masyarakat yang disampaikan terhadap BPKep dalam halnya pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPKep apakah usulan

tersebut mencakup tujuan keperluan warga atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Adapun usulan dari aspirasi masyarakat di kepenghuluan Siarang-arang dalam lajunya perkembangan pembangunan ditengah masyarakat sebagai berikut:

Tabel I.3 : Kegiatan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan terhadap usulan masyarakat Kepenghuluan Siarang-Arang yang terlaksana 2016-2020.

No	Usulan/ program	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
1	Pembuatan Body jalan putri hujau	Dusun I	-	38.000.000	Terlaksana
2	Drainase jln. SMA2	Dusun II	300 m	86.000.000	Terlaksana
3	Semenisasi Gg. Hermantosa	Dusun UB	150 m	98.000.000	Terlaksana
4	Drainase Gg. Hermantosa	Dusun UB	120 m	41.880.000	Terlaksana
5	Drainase Gg. Arifin	Dusun UB	200 m	65.750.000	Terlaksana
6	Box culver jln. Wakaf	Dusun Pemukiman	-	60.000.000	Terlaksana
7	Drainase masjid al-ikhlas	Dusun Pemukiman	300 m	82.000.000	Terlaksana
8	Penimbunan Gg. Marjuki	Dusun Pemukiman	289 m	40.000.000	Terlaksana
9	Semenisasi KM. 12	Dusun Km 8	100 m	97.000.000	Terlaksana

Sumber: Kantor Kepenghuluan Siarang-Arang, 2021

Berdasarkan Tabel diatas Sebagai fungsi BPKep dimana dari tahun 2016-2020 BPK telah menerima aspirasi masyarakat desa melalui usulan Pembangunan perekonomian masyarakat desa serta pembangunan infasruktur Kepenghuluan.

Tabel I.4 : Kegiatan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan terhadap usulan masyarakat Kepenghuluan Siarang-Arang yang Tidak Terlaksana 2016-2020.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pariwisata Pasir Putih Kepenghuluan Siarangarang	Dusun I		-	Tidak Terlaksana
2	Drainase Jln. Putri Hijau	Dusun I	500 m	-	Tidak Terlaksana
3	Semenisasi Jln. Kh. Muhammad Kasim	Dusun I	120 m X 3 m	-	Tidak Terlaksana
4	Perehapan Semenisasi Turunan Madrasah Suluk	Dusun I	200 m	-	Tidak Terlaksana
5	Semenisasi Jln.Panglima Nyarang	Dusun I	40 m X 2 m	-	Tidak Terlaksana
6	Perternakan Bebek	Dusun I	1.000 Ekor	-	Tidak Terlaksana
7	Perehapan Seng Masjid Al-Mukminin Siarangarang	Dusun I		-	Tidak Terlaksana
8	Drainase Jln. Perumahan Resetlement Blok A	Dusun II	230 m	-	Tidak Terlaksana
9	Drainase Jln. Perumahan Resetlement Blok B	Dusun II	180 m	-	Tidak Terlaksana
10	Drainase Jln. Perumahan Resetlement Blok C	Dusun II	180 m	-	Tidak Terlaksana
11	Semenisasi Jln. Kepala Kota	Dusun II	200 m	-	Tidak Terlaksana
12	Semenisasi Gg. Rajak	Dusun Usaha Baru	200 m	-	Tidak Terlaksana
13	Semenisasi Jln. Ahmad Sah	Dusun Usaha Baru	260 m	-	Tidak Terlaksana
14	Drainase Jln. Lama	Dusun Usaha Baru	200 m	-	Tidak Terlaksana
15	Drainase Gg. Pusara	Dusun Usaha Baru	200 m	-	Tidak Terlaksana
16	gedung MDA Usaha Baru	Dusun Usaha Baru	1 Unit	-	Tidak Terlaksana
17	Semenisasi Gg. MDTA AL-Firdaus	Dusun Pemukiman	200 m	-	Tidak Terlaksana
18	Box Culvert Jln Waktu	Dusun Pemukiman	6 m X 3 m	-	Tidak Terlaksana
19	Gedung MDTA Al-Firdaus	Dusun Pemukiman	1 Unit	-	Tidak Terlaksana
19	Renofasi Box Culver Jln. Lintas Pujud	Dusun Pemukiman	12 m X 3 m	-	Tidak Terlaksana
20	Semenisasi Gg. Sepakat	Dusun KM. 8	120 m	-	Tidak Terlaksana

Sumber: Kantor Kepenghuluan Siarang-Arang, 2021

Sebagai badan yang memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintahan kepenghuluan seharusnya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang-Arang dapat berkontribusi dalam pembentukan peraturan kepenghuluan, menetapkan mengawasi pelaksanaan, menghimpun dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat, serta dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari penghulu .

Namun menurut pengamatan penulis dilapangan ada beberapa hal yang masih menjadi catatan yang kurang baik atas kinerja dari badan permusyawaratan kepenghuluan Siarang-arang saat ini seperti Kurangnya peran BPKep Siarang-Arang tidak datang dalam menghadiri rapat,maksudnya masih ada lagi yang anggota BPKep ini tidak hadir dalam rapat MUSREMBANG kepenghuluan, hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan oleh badan permusyawaratan kepenghuluan siarang-arang dalam menjalankan fungsinya, selanjutnya masalah aspirasi tentang lemahnya pelayanan yang diberikan oleh pihak kepenghuluan kepada masyarakat, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak BPKep Siarang-Arang selaku Badan yang mengawasi Pemerintahan Kepenghuluan. Hal ini terbukti dengan belum adanya perubahan pada hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas serta pra survey penulis dilapangan terlihat fenomena dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan anggota BPKep dalam proses dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Terlihat kurang tersalurnya aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPKep dan diteruskan kepada pihak yang terkait. Seperti saat rapat Musrembang Kepenghuluan, masyarakat

(hanya perwakilan saja) mengusulkan aspirasinya kepada BPKep tetapi usulan tersebut hanya sedikit yang dapat dilaksanakan,

2. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluan Siarang-Arang tidak mencapai target waktu pengerjaan, masih banyak pembangunan yang terbengkalai atau mangkrak penyelesaiannya, di duga dengan adanya permasalahan tersebut ini akan muncul karna BPKep Siarang-Arang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dimana salah satu Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan kepenghuluan.
3. Masih kurang aktifnya pengawasan BPKep terhadap pembangunan desa, terlihatnya hanya sedikit pembangunan yang dapat terealisasi dapat dilihat dari data tabel I.3 sehingga disini terlihat kurangnya peranan oleh usulan masyarakat dalam hal pembangunan.

Berhubung dengan permasalahan diatas dan juga didukung dengan fakta-fakta lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang optimalnya Badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah:

“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”

A. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga aspirasi masyarakat dapat

disalurkan dan dibuat kebijakan/aturan oleh Pemerintahan Kepenghuluan Siarang-Arang guna mewujudkan pemerintahan yang baik, akan tetapi nyatanya fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud ini diduga berjalan belum optimal dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas , maka penulis merumuskan masalah pokok pada penelitian ini yaitu: **“Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?”**

B. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan penelitian

1) Secara teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah pengawasan khususnya terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2) Secara praktis

- a. Memberi informasi dan wawasan bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik yang mirip ataupun yang lain.

3) Secara Akademis

- a. Secara akademik, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Manusia memiliki potensial yang secara rasional dapat membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendaknya mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerjasama dapat dikonsepsikan sebagai “administrasi”.

Menurut Waldo (dalam Ali, Faried, 2011; 187) Administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama.

Menurut Siagian (2003;2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama anatar dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lebih lanjut Siagian (2003;3) mengatakan bahwa unsur-unsur yang utama dan administrasi adalah:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Sarana dan prasarana

Selanjutnya Administrasi menurut Siagian (2014;4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan

diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Admosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;4) Administrasi adalah sebagai fungsi atau kegiatan seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang terjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya, setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi (dalam Zulkifli, 2009;12-14) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern, eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat dalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit Administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manejer, dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan secara dan melalui organisasi.

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah sikap kelakuan sosial tertentu yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu.
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran keterampilan yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan "overall management" dari suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya dimaksud meliputi orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (mechines), ruang (space), tenaga atau energy (energy), dan waktu(time). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Menurut Zulkifli (2009; 14) Unsur-unsur umum administrasi adalah:

1. Organisasi (Tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (Tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansial (tatakeuangan)
7. Material (tatapembekalan)
8. Relasi publik (tatahumas)

Selanjutnya Zulkifli (2009; 12) menerangkan bahwa terdapat 3 pengertian subtensial yang terkandung dalam sejumlah defenisi konsep administrasi tersebut.

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional.
2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih.
3. Bahwa konsep sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru.

Dari segi administrasi dibagi dua bagian besar yaitu: Administrasi Negara dan privat. Menurut Gordon (dalam Syafii. 2003;33) administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan organisasi maupun

parorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2013;4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2013;4) administrasi adalah suatu fenomena sosial yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerjasama beberapa orang untuk mecapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerjasama suatu organisasi itu tidak akan dapat berjalan dengan baik.

2. Konsep Organisasi

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi, yang merupakan fenomena masyarakat Modern. Dalam masyarakat modern, sebagian besar kegiatan-kegiatan para warganya dilangsungkan dalam organisasi modern, dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Siagian 2006; 52) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Selanjutnya menurut Kamsir (2014; 73) organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Siagian(dalam Zulkifli,2009;71) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuna yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan Zulkifli(2009;71) sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendegelasan wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Selanjutnya Zulkifli (2009;74) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas petunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dan menurut Chester I. Barnard (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;99) memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktifitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Sedangkan menurut Ali (2015; 28) mengatakan bahwa, Organisasi merupakan wujud Conscience collective (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan.

Hamin (2005; 117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang berkoordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang reatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti yang dikemukakan siagian (2003;96) organisasi sebagai wadah adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (dalam Budiardjo 2009;17) .

Menurut Irra (2011;10) organisasi adalah kegiatan mengelompokkn dan menyusun kerangka, jalinan hubungan kerjasama diantara para pekerja dalam suatu wadah bagi setiap segenap usaha mencapai tujuan tertentu.

Defenisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai prilaku dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, defenisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerjasama dan tujuan bersama hendak dicapai.

Penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau suatu sistem yang saling mempengaruhi antara orang inidvidu dan kelompok yang bekerjasama dalam lingkungan organisasi, dan dapat dipastikan bahwa semua pihak dalam

organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (2003;5) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dalam definisi ini, manajemen dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang jelas.

Lebih lanjut Tery (Dalam Hasibuan 2009;2) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Menulang (dalam Zulkifli& Nurmasari 2015;4) manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Selanjutnya menurut Winardi (2010; 76) mengemukakan manajemen adalah sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian , penggerakan, dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan

untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut siagian (dalam Andry, 2015;12) manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dipisahkan.

Selanjutnya menurut Stoner (dalam Zulkifli& Yogia 2014;17) manajemen merupakan proses, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Terry (dalam Zulkifli& Yogia 2014; 18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Selanjutnya menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli& Yogia 2014;18) manajemen suatu sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa pergerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu:

1. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.
2. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
3. Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau kelarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan langkah, sikap, serta mencegah, timbulnya, pertentangan, kekacauan, kekembaran dan kekosongan tindakan.
5. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
6. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Selanjutnya menurut Mary Parker (dalam novitasari, 2017; 13) manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dalam arti, bahwa manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Manajemen secara pengertian yang dikemukakan oleh faktor (dalam Sule dan Saefullah 2005;5) adalah sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu pada orang lain, *Management Is The Gating Things Trough People*

Menurut Nickles (dalam Sule dan Saefullah 2005: 6) manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai

kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut (Zulkifli 2005; 28) bahwasanya manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi yang ditetapkan.

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan-tindakan, yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bersama dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

4. Konsep Fungsi

Sutarto (2008;22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Musanef (2004:10) menjelaskan “ Yang maksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktifitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu”.

Selanjutnya Siagian (2006;155) mengemukakan, “sacara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perinciab dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan, “*derivation*” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.

Sedangkan menurut Nasucha (2010; 22) fungsi adalah rincian yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelkasanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Defenisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif(teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

5. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah usaha-usaha yang dilaksanakan guna mewujudkan semua rangkaian rencana dan kebijaksanaan didalamnya yang mana telah ada proses perumusan didalamnya, dan didalamnya dilengkapi segala sector mulai dari siapa yang melaksanakan rencana tersebut, dimana tempat merealisasikan pelaksanaannya, dan bagaimana tahapan yang harus dilaksanakan.

Menurut pendapat Nurdin Usman (2002; 70) pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana peleksanaan bisa diartikan penerapan. Serta Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah perluasan dari sebuah aktivitas yang saling menyesuaikan .

Menurut Hinggis (dalam Pasolong 2007;57) mendefenisikan pelaksanaan atau implementasi merupakan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Azam Awang (2010;32) implementasi atau pelaksanaan merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat suatu bentuk output yang jelas.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepala implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Selanjutnya menurut Terry (dalam Wahyu Hidayat, 2011;24) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karna itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Menurut Bintoro (dalam Adisasmita, 2011; 24) pelaksanaan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,

dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu memulainya. (Adisasmita 2011; 24).

Menurut Lester dan steward (dalam Nawawi, 2000) implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik, kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non-politik yaitu administrative.

Menurut Meter dan Horn (1975) (dalam Leo Agustino, 2014; 139) mendefenisikan pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya menurut Wahyu Nurharjadmo (dalam Mulyadi, 2016;50) studi pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses pelaksanaan, tujuan utama kebijakan dan juga untuk mengetahui proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan.

Terdapat empat Variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan/ implementasi suatu kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino L, 2020; 154) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, merupakan sebuah program yang dapat dilangsungkan prakteknya dilapangan dengan jelas bagi seorang pelaksana. Harus ada penyampaian informasi yang baik, kejelasan penerima informasi tersebut dan penyampaian informasi yang konsisten

2. Sumber daya , komponen jumlah staf dan kualitas didalamnya, informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan sebuah kewenangan yang cukup adalah komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Disposisi, sebuah komitmen dari seorang pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana program.
4. Struktur birokrasi, adalah sebuah struktur aliran dari sebuah pelaksanaan program tersebut. Sebuah penanganan yang serius dan baku bisa dilakukan bila hasil yang diinginkan belum mencapai hasil yang baik.

Westra (2011:24) mengemukakan bahwa Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya. Dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu:

1. Melaksanakan semua rencana
2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan
4. Siapa yang akan melaksanakan.

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan merupakan rangkaian program oleh pemerintah harus terdapat sebuah kondisi yang baik didalamnya, baik melaksanakan sebuah pelaksanaan di lapangan atau diluar lapangan. Dukungan alat-alat penunjang yang baik dalam proses pelaksanaan sangat dibutuhkan guna mewujudkan usaha rangkaian program yang dibuat itu.

6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam suatu organisasi, yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan pengawasan kinerjanya, karena itulah manusia juga perlu manajemen.

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang utama dalam organisasi yang mana berperan sebagai penggerak dari berjalannya suatu tujuan yang telah ingin dicapai. Maka dari itu untuk berjalannya tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien diperlukannya manajemen sumber daya manusia.

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Veithzal Rivai (2009;1) menjelaskan bahwa Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian.

Menurut Mangkunegara (2011;10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Mahirot (dalam Danang, 2003; 1) mengatakan manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Menurut Kamsir (2014; 157) manajemen sumber daya manusia adalah konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Hasibuan (2010;10) manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan juga seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan juga masyarakat.

Salanjutnya menurut hasibuan (2000; 100) manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap sumber daya yang bersumber dari manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang sangat penting dalam suatu organisasi dan sumber daya yang dapat menentukan arah dari organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi dengan fasilitas, saran dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan besar sulit untuk mencapai tujuan dan tidak berjalan dengan semestinya sesuai tujuan yang ditetapkan dalam suatu bersumber pada potensi manusia yang ada dalam organisasi, dan merupakan modal dasar dalam organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan

7. Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan atau yang disebut dengan nama lain menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan permusyawaratan kepenghuluan sebagai salah satu pendemokrasian masyarakat ditingkat desa tentu juga harus bersifat independen atau mandiri yang jauh dari pengaruh-pengaruh yang bersifat kepentingan politisi dari berbagai pihak atau unsur-unsur tertentu, sehingga nilai-nilai demokrasi ditingkat desa akan dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan lembaga demokrasi independen ditingkat desa, maka salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ialah berupaya untuk menjadikan Badan Permusyawaratan

Kepenghuluan yang professional untuk mewujudkan misi yang telah diembankan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Pasal 1 ayat 7 yang berisi “Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang disingkat BPKep, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tugas, fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dijelaskan pada pasal 9,10, dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep).

Pasal 9 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berfungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama penghulu
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja penghulu.

Pasal 10 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu
- b. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian penghulu
- c. Membentuk panitia pemilihan penghulu
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

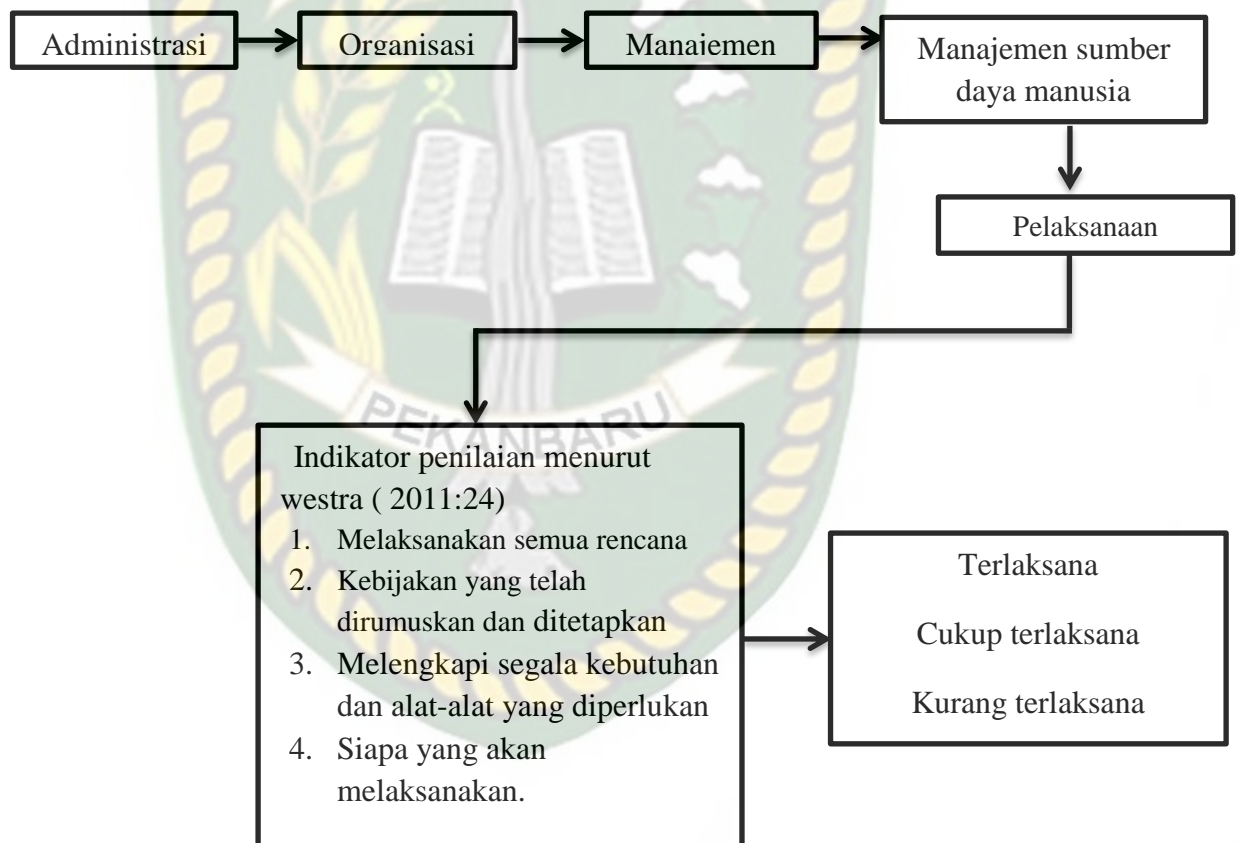
Pasal 11 Badan permusyawaratan kepenghuluan berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan kepada pemerintah kepenghuluan;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan;
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir**



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerja anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia berkonsep dengan bertalian kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola dan mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Fungsi adalah penetapan pelaksanaan kinerja yang diemban dalam pencapaian tujuan yang terarah.
6. Badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Pelaksanaan merupakan tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dan memiliki banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II. 2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Westra (2011:24) mengemukakan bahwa Pelaksanaan : Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan	a. Melaksanakan semua rencana	1. Mengadakan Rapat pembahasan terhadap masyarakat kepenghuluan. 2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		b. Kebijakan yang telah dirumuskan	1. Membuat program kebijakan oleh BPKep 2. Mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (dalam musrembang)	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		c. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan	1. Memiliki Staf atau SDM yang cukup memadai dan berkompeten 2. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana atau ruang kerja khusus untuk BPKep dalam melakukan tugasnya.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		d. Siapa yang akan melaksanakan.	1. Ketua BPKep 2. Anggota BPKep	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan operasional variabel di atas diberi penjelasan bahwa dari konsep Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari empat indikator yaitu, Melaksanakan semua rencana, kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, Siapa yang akan melaksanakan.

E. Teknik Pengukuran

Adapun Teknik pengukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori terlaksana atau jawaban responden berada pada persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana:Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori cukup terlaksana atau jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana atau jawaban responden berada pada persentase 33%-65%.

Kurang terlaksana:Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang terlaksana atau jawaban responden berada pada persentase 0%-32%.

Untuk pengukuran dalam indikator Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, ditetapkanlah ukuran sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua rencana

Terlaksana :Apabila semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana:Apabila 1 item atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 33%-65%.

Kurang Terlaksana:Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 0%-32%.

2. kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan,

Terlaksana :Apabila semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 66%-100%

Cukup terlaksana :Apabila 1 item atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 33-65%.

Kurang terlaksana :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 0%-32%.

3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan.

Terlaksana :Apabila semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 66%-100%

Cukup terlaksana : Apabila 1 item atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 33%-65%.

Kurang terlaksana: Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 0%-32%..

4. Siapa yang akan melaksanakan.

Terlaksana :Apabila semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 66%-100%

Cukup terlaksana :Apabila 1 item atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 33-65%.

Kurang terlaksana:Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 0%-32%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Penelitian survey untuk mengumpulkan data-data untuk mengkonfirmasi mengenai populasi yang besar dengan memakai sampel yang kecil.

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif menurut Sugiyono (2014;2) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan membagikan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagaimana peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasinya, sehingga akan memperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono 2019; 15) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kepenghuluan Siarang-Arang, adapun alasan penulis Meneliti Di Kepenghuluan Siarang-Arang karena penulis menemukan beberapa fenomena bahwa belum efektifnya kinerja dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam menjalankan fungsinya yaitu menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Di Kepenghuluan Siarang-Arang.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2014;148) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penghulu, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua BPKep, Anggota BPKep, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Kepenghuluan Siarang-Arang.

2. Sampel

Menurut sugiyono (2014;149) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik.

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penghulu	1	1	100%
2	Sekretaris penghulu	1	1	100%
3	Kepala Urusan	3	3	100%
4	Kepala Dusun	5	5	100%
5	Ketua BPKep	1	1	100%
6	Sekretaris BPKep	1	1	100%
7	Anggota BPKep	8	8	100%
8	RT/RW	39	10	29%
	Tokoh masyarakat	4	4	100%
	Jumlah	63	34	-

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi sampel, Penghulu, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua BPKep, sekretaris BPKep, Anggota BPKep, RT/RW, Tokoh Masyarakat, yang digunakan penarikan sampel teknik sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 34.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, laporan-laporan penelitian terdahulu, arsip-arsip, struktur organisasi serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melanjutkan data dan informasi yang lebih valid , maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi yang diberikan secara menyeluruh yang dianggap mengerti dengan permasalahan yang diteliti, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan.
2. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung kelapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan.
3. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebabkan suatu daftar pertanyaan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.
4. Dokumentasi adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berupa penyalinan buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah,

arsip-arsip, dan laporan yang Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yang mana setelah data yang dibutuhkan sudah diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan lalu diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kuantitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan analisisnya

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian kegiatan penelitian tentang “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Jan-Feb				Mar – Apr				Mei-juni				Juli-Agu				Sep-Okt				Nov-Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada Di Provinsi Riau, yang mana dulunya rokan hilir ini termasuk kedalam kabupaten bengkalis. Rokan hilir ini ibu kotanya ialah Bagan Siapi-api yang merupakan kota terbesar, bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten rokan hilir memiliki luas wilayah sebesar 8.881,59 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 741.497 (2019). Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan wilayah utara selat malaka, timur kota dumai, selatan kabupaten Rokan Hulu,dan Kabupaten Bengkalis dan Barat Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara.

Wilayah kabupaten rokan hilir dialiri beberapa sungai, berdasarkan data yang ada daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai, sungai-sungai yang ada dikabupaten ini pada umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong), kapal motor penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai rokan. Adapun sungai-sungai tersebut ialah: sungai rokan, sungai duku, sungai ular, sungai tengger, sungai siandun, sungai daun, sungai agas , sungai bangko dan lain-lain, dari sekian banyaknya sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan ialah sungai rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Secara geografis letak kabupaten rokan hilir digaris khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten rokan hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26-32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir 52 rata-rata pada tahun 2008 melihat keadaan ini berarti musim kering didaerah ini lebih panjang dari pada musim penghujan. Musim kering hampir terjadi dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim hujan lima bulan.

Kabupaten Rokan hilir mempunyai banyak sungai, yang paling terkenal ialah sungai Rokan mencapai \pm 350 KM, sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu, artinya sungai ini pada dahulu selain sebagai transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci dan sebagai tempat mata pencaharian ekonomi oleh masyarakat sekitar.

Berikut daftar kecamatan yang ada di Kabupaten rokan hilir :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas

12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam
16. Kecamatan Balai Jaya
17. Kecamatan Bagansinembah Raya
18. Kecamatan Tanjung Medan

Jika dilihat dari sisi Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Rokan Hilir khususnya Bagan Siapi-Api adalah wilayah wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal ,selain pemandangan alam yang ada di Pulau Jemur yang berada \pm 45mil dari kota Bagan Siapi-Api pulau ini dikenal salah satu gugusan pulau yang sangat kaya dengan akan hasil telur penyu dan sarang burung waletnya, ada Ritual Bakar Tongkang , Ritual Bakar Tongkang adalah wisata unggulan Provinsi Riau Dari Kabupaten Rokan Hilir, ritual Bakar Tongkang ini sudah menjadi Wisata Nasional bahkan Internasional, Bakar Tongkang merupakan Upacara Adat Tradisional oleh masyarakat Tionghoa Di Bagan Siapi-Api, ada juga Museum Bagan Siapi-api Tempo Doeloe yang terletak Di Kota Bagan Siapi-Api, ada juga Danau Napangga yang terletak Di Kecamatan Tanjung Medan, Pulau Tilan, Desa Bantaian Dengan Batu Belah Batu Betangkup dan masih banyak lagi tempat wisata yang siap dikembangkan Kabupaten Rokan Hilir.

B. Gambaran Singkat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan pujud merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten rokan hilir, kecamatan pujud merupakan salah satu kecamatan pemekeran Tanah

Putih, yang berbatasan dengan Tanah Putih , Bagan Sinembah dan Kecamatan Tanjung Medan. Kecamatan Pujud juga berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Pujud memiliki luas 726.80 km² atau sekitar 11,09 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan Kecamatan dengan wilayah paling luas ketiga.

Kecamatan Pujud terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Kepenghuluan, yakni Kelurahan Pujud Selatan, Kepenghuluan Air Hitam, Babussalam Rokan, Pujud, Pujud Utara, Kasang Bangsawan, Kasang Bangsawan Muda, Pematang Genting, Perkebunan Siarang-Arang, Siarang-Arang Rokan, Siarang-Arang, Suka Mulya, Sukajadi, Sungai Pinang, Teluk Nayang, Ulak Kembahang.

C. Gambaran Umum Kepenghuluan Siarang-Arang

Kepenghuluan Siarang-Arang merupakan salah satu dari 16 Kepenghuluan Di Wilayah Kecamatan Pujud. Luas kepenghuluan siarang arang 13.774 Ha/M². jarak desa dengan Provinsi sepanjang 278 Km dengan jarak tempuh 5jam dan jarak dengan kecamatan 12Km dengan jarak tempuh 20menit.

Adapun batas wilayah Kepenghuluan Siarang-Arang sebagai berikut.

- Sebelah utara : kep. Perkebunan siarang-arang
- Sebelah selatan : kep. Kasang padang/jurong
- Sebelah barat : kep. Sukajadi dan babussalam rokan
- Sebelah timur : Kep. Siarang-arang rokan

1. Jumlah penduduk

Secara administrasi kepenghuluan siarang-arang mempunyai penduduk pada tahun 2019 3.139 jiwa, yang terdiri dari 1.582 orang penduduk laki-laki dan 1.557 orang berjenis perempuan. Dengan jumlah KK sebanyak 783 KK, dan terdiri dari 39 rt dan 14 RW . penduduk Kepenghuluan siarang arang terdiri dari beraneka ragam suku diantaranya Melayu, batak, jawa, minang, niasyang telah menajadi anggota penduduk di kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir karna sudah mendirikan rumah di desa tersebut.

2. Agama dan Kepercayaan

Penduduk wilayah kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir beragama islam dan Kristen.

Tabel IV.1: Jumlah penduduk Kepenghuluan siarang-arang berdasarkan Agama dan kepercayaan

No	Agama	Jiwa
1	Islam	3.083
2	Kristen	56
Jumlah		3.139

Sumber: data olahan peneliti 2021

Dilihat dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kepenghuluan siarang-arang pada umumnya beragama islam yaitu sebanyak 3.083 jiwa dan beberapa lainnya beragama Kristen yaitu sebanyak 56 jiwa .

3. Mata pencaharian

Pada umumnya penduduk siarang-arang bermata pencarian Petani dan Nelayan:

Tabel IV.2: Mata Pencaharian masyarakat kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir 2020

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	780
2	Buruh tani	346
3	Pegawai Negri Sipil	48
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2
5	Pedagang	188
6	Peternak	8
7	Nelayan/Keramba	362
8	Tenaga Honorer	100
Jumlah		1.835

Sumber: *Kepenghuluan Siarang-arang 2021*

Dengan melihat jenis mata pencaharian dari penduduk di kepenghuluan siarang-arang maka dapat dilihat yang lebih dominan dengan mata pencaharian sebagai petani sebanyak 780, nelayan/keramba 362.

4. Pendidikan

Adapun pendidikan masyarakat kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir yaitu TK, SD,SLTP/SMP, SLTA/SMA, S1

Tabel IV.3: Jumlah penduduk kepenghuluan siarang-arang berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jiwa
1	Sedang TK	17
2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	695
3	Tamatan SD	371
4	Tamatan SLTP/SMP	481
5	SLTA/SMA	597
6	SI	48

Jumlah	2.209
--------	-------

Sumber: data olahan penelitian tahun 2021

D. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam sistem pemerintahan desa sekarang menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya apa saja tugas para anggota BPKep itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa. Fungsi BPKep didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 15 Tahun 2014 ialah menyepakatai rancangan peraturan desa bersama kepa desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Dari tiga tugas tersebut sudah jelas bahwa BPKep adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangun kepenghuluan.

BPKep juga mempunyai kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPKep harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPKep dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah suatu kebijakan kepenghuluan. BPKep juga menyalurkan aspirasi dari warga desa ke kepala desa yang kemudia dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya, BPKep juga sekaligus memiliki kekusaan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPKep dalam ranah politik dan sosial desa.

Struktur Organisasi dan Susunan pengurus BPKep Kepenghulan Siarang-Arang adalah sebagai berikut ini:

1. Pemimpin BPKep terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan sekretaris
2. Pimpinan bpkep dipilih dari dan oleh anggota BPKep secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus
3. Rapat pemilihan pimpinan BPKep untuk pertama kali dipimpin anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota termuda
4. Peresmian pimpinan BPKep ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota
5. Pimpinan BPKep bertugas memimpin rapat-rapat BPKep dan bersifat kolektif

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil Penelitian Di Kepenghulan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dikemukakan Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghulan (BPKep), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Permusyawaratan Kepenghulan (BPKep).

Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Responden dalam penelitian penelitian ini adalah Penghulu, sekretaris penghulu, Dusun, Kaur, rt/rw, tokoh masyarakat, ketua BPKep dan anggota BPKep.

1. Identitas responden Berdasarkan jenis kelamin

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 orang yang terdiri dari 1 orang penghulu, 1 orang sekretaris Desa, 3 orang Kaur, 5 Orang Dusun, 1 orang ketua BPKep, 1 orang Sekretaris BPKep, 7 orang anggota BPKep, 10 orang RT/RW, dan 4orang Tokoh masyarakat.

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Laki-laki	31	94 %
2	Perempuan	2	6%

1	2	3	4
	Jumlah	33	100%

Sumber: Hasil penelitian lapangan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 33 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan 2 orang.

2. Identitas responden berdasarkan Usia

Kebenaran data juga sangat ditentukan oleh emosional seseorang. Usia seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan diri seseorang dalam menilai dan menuntaskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan lebih bsmaka untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	26-45	13	40%
2	46-55	15	45%
3	56-65	5	15%
Jumlah		33	100%

Sumber: data olahan penelitian lapangan 2021

Dapat dilihat dari tabel V.2 diatas diketahui bahwa responden yang terbanyak yaitu umur 45-55 tahun dengan persentase 45% , responden berumur 26-45 tahun

dengan persentase sebanyak 40% , sedangkan responden paling sedikit pada umur 56-65 dengan persentase sebanyak 15%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas responden dalam penelitian ini tergolong dalam usia produktif secara kejiwaan yang lebih matang dalam pola pikir.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga sangat menentukan hasil dari setiap jawaban yang diberi oleh responden, adapun identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD/ Sederajat	5	15%
2	SMP/ sederajat	7	21%
3	SMA/ sederajat	16	49%
4	S1	5	15%
Jumlah		33	100%

Sumber: data olahan penelitian lapangan 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SMA/ Sederajat dengan persentase 49%, dan yang terendah SD/Sederajat Dengan persentase 15%, SMP/ Sederajat dengan persentase 21%, dan S1 dengan persentase 15%. Secara tidak langsung

pendidikan responden dalam penelitian ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil yang akan peneliti dapatkan.

B. Pembahasan Hasil Peneliti Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tujuan penelitian ini penulis mengemukakan pada bab sebelumnya, dalam menganalisa dan memahami Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk menganalisis dan memahami tentang pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan kepenghuluan di kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupate rokan hilir, penulis menggunakan indikator berdasarkan teori pelaksanaan menurut westra diantaranya: Melaksanakan semua rencana, Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, Siapa yang akan melaksanakan.

Berikut penulis tampilkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

1. Melaksanakan Semua Rencana

Melaksanakan semua rencana ialah dimana sebuah tahapan perencanaan dari setiap program yang berasal dari dalam organisasi dan saling berkaitan dengan

tujuan yang sudah disepakati oleh pihak organisasi yang mana didalam perencanaan tersebut berpatok kepada penetapan tujuan yang telah disepakati sebelumnya, dan dari hasil kesepakatan tersebut dan melaksanakan perencanaan yang dilaksanakan dapat berjalan, untuk setiap perencanaan itu akan selalu dievaluasi dan dari evaluasi tersebut akan memberikan hasil dari kinerja keseluruhan dari program yang sudah disepakati.

Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator melaksanakan semua rencana. Berdasarkan indikator melaksanakan semua rencana dalam penelitian ini terdapat dua sub indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya dengan cara melihat dari Mengadakan Rapat pembahasan terhadap masyarakat kepenghuluan, Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting. Untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Melaksanakan Semua Rencana

No	Sub indikator	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Mengadakan Rapat pembahasan terhadap masyarakat kepenghuluan.	3	25	3	31

1	2	3	4	5	6
2	Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting	1	29	1	31
Jumlah		4	54	4	62
Rata-rata		2	27	2	31
Persentase		6,5%	87%	6,5%	100%

Sumber: data olahan peneliti tahun 2021

Berdasarkan tabel V.4 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Melaksanakan Semua Rencana tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, yaitu pada kategori terlaksana dengan 6,5% adapun kesimpulan dari beberapa alasan responden yang menjawab terlaksana ialah karena responden merasa BPKep telah melaksanakan rencananya seperti hal dalam mengadakan rapat kepenghuluan. Kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana yaitu sebanyak 87%, adapun kesimpulan dari beberapa alasan responden yang menjawab cukup terlaksana ialah karena responden merasa dalam melaksanakan rencana, BPKep masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki seperti pada rapat yang diadakan masih jarang ikut serta dengan berbagai alasan sehingga belum tertelaksana dengan baik semua. Dan kategori kurang terlaksana sebanyak 6,5% adapun kesimpulan dari beberapa alasan responden menjawab kurang terlaksana ialah dikarenakan Badan permusyawaratan kepenghuluan belum ada melaksanakan semua rencana selain rencana yang telah dibuat atau maksud nya belum terealisasikan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam melaksanakan semua rencana cukup terlaksana terbukti dari jawaban responden pada kategori cukup terlaksana dengan persentase 87%.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini penulis juga menyertakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada Penghulu Siarang-Arang Bapak Darmalis S.E Dan sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang Arang Bapak Iswanto Hasibuan, mengenai indikator melaksanakan semua rencana, berikut adalah tanggapan dari Penghulu Siarang-Arang yakni bapak Darmalis S.E pada tanggal 4 juli 2021 pukul 16:30 WIB mengatakan bahwa :

“Sudah pasti ada yang namanya mengikut sertakan masyarakat, tetapi maksud dari masyarakat disini tidaklah keseluruhan hanya sebagian saja seperti orang terpenting di kepenghuluan ini, seperti Dusun, RT/RW, Tokoh masyarakat dan bagian penting lainnya. Karena jika kita undang seluruh masyarakat itu tidak mungkin jadi hanya perwakilan saja yang di undang, tetapi jika ada masyarakat yang ingin datang juga tidak apa-apa tetapi kadang sebagian masyarakat juga saat di undang tidak pernah hadir dalam forum rapat tersebut, bahkan terkadang ada rapat yang harus di pimpin oleh BPKep itu sendiri juga jarang hadir dalam rapat hanya sebagian saja, dengan alasan kerjaan yang lain atau urusan yang lain, sehingga para anggota BPKep disaat rapat ada yang tidak ikut serta, lebih tepatnya disini kurangnya komunikasi yang baik ya, kurang lebih begitu”.

Untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, selain melakukan wawancara kepada Penghulu Siarang-Arang, penulis juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Bapak Iswanto Hasibuan, pada tanggal 6 juli 2021, pukul 11:20 WIB, adapun tanggapan beliau yaitu sebagai berikut:

“kalau undangan untuk masyarakat ada tetapi ya bukan seluruh hanya sebagian saja, karna disaat rapat hanya perwakilan saja yang menyampaikan aspirasi, itupun setelah aspirasi kita dengar tidak mungkin semuanya kita terima jadi hanya sebagian saja, dan setiap rapat pasti kita akan diskusikan bersama-sama dengan musyawarah dan mufakat, rapat yang kami buat ini sifatnya terbuka, kami akan menerima apa saja yang dibicarakan dari beberapa pihak seperti usulan-usulan program perencanaan kebijakan, setelah itu nanti akan kami saring lagi atau akan kami evaluasi lagi lalu kami akan mengusulkan ke kepenghuluan untuk tindak lanjutnya, tetapi banyak juga keluhan dari masyarakat tentang usulan yang diberikan tidak dapat terlaksana dengan keinginan masyarakat, tentunya kami akan memilih mana usulan yang lebih penting.”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan maka peneliti dapat mengetahui beberapa informasi mengenai indikator melaksanakan semua rencana, dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwasanya Badan permusyawaratan kepenghuluan siarang-arang cukup terlaksana dalam melaksanakan semua rencana hal ini ditandai jarang nya Badan permusyawaratan kepenghuluan menjalankan fungsinya dapat dilihat pada saat rapat masih ada lagi anggota bpkep itu yang tidak hadir dalam rapat tersebut, sehingga seperti tidak ada keseriusan oleh badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menjalankan fungsinya.

Dari hasil uraian data tabel dan hasil wawancara diatas serta hasil dari pengamatan peneliti dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator melaksanakan semua rencana yaitu cukup terlaksana meskipun masih terdapat kekurangan namun badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) di kepenghuluan siarang-arang sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan semua rencana yang dibuat oleh bpkep itu agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Kebijakan Yang Dirumuskan

Kebijakan yang dirumuskan ialah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok dalam suatu lingkungan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator kebijakan yang dirumuskan. Berdasarkan indikator kebijakan yang dirumuskan dalam penelitian ini terdapat dua sub indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya dengan cara melihat dari, Membuat program kebijakan oleh BPKep, Mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (dalam musrembang). Untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Kebijakan Yang Dirumuskan

NO	Sub Indikator	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Membuat program kebijakan oleh BPKep	1	29	1	31

1	2	3	4	5	6
2	Mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (dalam musrembang)	3	26	2	31
	Jumlah	4	55	3	62
	Rata-rata	2	27,5	1,5	31
	Persentase	6,5%	88,7%	4,8%	100%

Sumber: olahan data peneliti tahun 2021

Berdasarkan tabel V.5 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Kebijakan yang dirumuskan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Responden menjawab Terlaksana sebanyak 6,5%, cukup terlaksana 88,7%, dan kurang terlaksana 4,8%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan rsponden mengenai kebijakan yang dirumuskan oleh BPKep berkategori cukup terlaksana dengan persentase 88,7%

Untuk memperkuat hasil penelitian ini penulis juga menyertakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada Penghulu Siarang-Arang Bapak Darmalis S.E Dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Bapak Iswanto Hasibuan, mengenai indikator kebijakan yang dirumuskan, berikut adalah tanggapan dari Penghulu Siarang-Arang yakni Bapak Darmalis S.E pada tanggal 4 juli 2021 pukul 16:30 WIB, mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya BPKep ini kurang dalam membuat kebijakan atau program-program, yang ada bahkan setiap program yang dibuat, pihak BPKep hanya menerima untuk menandatangani atau mengesahkan seperti pengesahan RPJM, RKP, dan APBKep, kalau untuk program kerja dari mereka sendiri saya selaku penghulu pun tidak tahu, kemungkinan tidak ada, kalau untuk mendengarkan aspirasi masyarakat itu sudah pasti setiap perwakilan Dusun atau Rt/Rw berhak diterima usulan-usulannya apa yang mereka butuhkan, kami pihak kepenghuluan hanya menerima apa yang telah dilaporkan oleh pihak BPKep”.

Untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, selain melakukan wawancara kepada Penghulu Siarang-Arang, penulis juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Bapak Iswanto Hasibuan pada tanggal 6 juli 2021, pukul 11:20 WIB, adapun tanggapan beliau yaitu sebagai berikut:

“kalau ditanya agenda atau program saya selaku sekretaris BPKep sendiri sepertinya tidak ada, harusnya ada ya tapi bisa dilihat sendiri gimana tidak berjalan dengan baiknya BPKep ini dikarna kan SDMnya sangat sangat kurang memadai, bahkan sudah hampir beberapa bulan ini saya selaku sekretaris tidak pernah diundang disaat rapat, saya tidak tau jelas apa alasannya mungkin karna saya terlalu keras di forum rapat jadi saya tidak penting untuk mereka undang, jadi kalau untuk program kerja sepertinya tidak ada lah kami, bisa dilihat langsung dilapangan gimana terlihat jelas kinerja dari BPKep itu sendiri”.

Berdasarkan dari observasi peneliti dilapangan informasi mengenai indikator kebijakan yang dirumuskan, peneliti melihat bahwa badan permusyawaratan kepenghuluan kurang terlaksana. Hal ini dapat ditandai dengan tidak berjalannya segala administrasi yang diperlukan seperti dalam pembuat kebijakan atau program bahkan agenda untuk bpkep itu sendiri serta arsip-arsip juga tidak lengkap dan tidak semuanya dipegang oleh sekretaris BPKep.

Dari hasil uraian data tabel dan hasil wawancara diatas serta hasil dari pengamatan peneliti dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator kebijakan yang dirumuskan yaitu kurang terlaksana karena BPKep tidak menjalankan fungsinya dengan baik, karna dapat dilihat dari pelaksanaan membuat program kebijakan atau kegiatan bahkan agenda dan pengarsipan yang diperlukan tidak berjalan baik sebagai mana mestinya.

3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan

Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan dari sebuah organisas terdapat pelaksanaan yang mana didalamnya terdapat SOPnya masing-masing. Dan dari setiap pelaksanaan itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari setiap pelaksanaan program. Sedangkan untuk perencanaan itu sendiri selalu ada nada POAC. Dan di dalam POAC ini organisasi akan selalu melengkapi segala kebutuhan dan juga alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya seperti. Seperti dengan adanya sumber manusia yang berkompeten guna untuk mencapai fungsi pelaksanaan Organisasi itu sendiri,dan memiliki fasilitas dan prasarana ruang kerja tersendiri dalam melaksanakan tugas.

Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan . untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Melengkapi Segala Kebutuhan Dan Alat-Alat Yang Diperlukan

No	Sub Indikator	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
1	Memiliki Staf atau SDM yang cukup memadai dan berkompeten	1	6	24	31
2	Memberikan fasilitas sarana dan prasarana atau ruang kerja khusus untuk BPKep dalam melakukan tugasnya	1	5	25	31
Jumlah		2	11	49	62
Rata-rata		1	5,5	24,5	31
Persentase		3,3%	17,7%	79%	100%

Sumber: olahan data 2021

Berdasarkan tabel V.6 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Responden menjawab Terlaksana sebanyak 3,3%, cukup terlaksana 17,7%, dan kurang terlaksana 79%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan responden mengenai melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan pada pelaksanaan fungsi BPKep berkategori kurang terlaksana dengan persentase 79% dari 31 responden.

Untuk memperkuat hasil hasil penelitian ini penulis juga menyertakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada penghulu siarang-arang bapak Darmalis S.E dan Sekretaris badan permusyawaratan kepenghuluan siarang-arang bapak Iswanto Hasibuan, mengenai indikator melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, berikut adalah tanggapan dari penghulu siarang-arang yakni bapak darmalis S.E pada tanggal 4 juli 2021 pukul 16:30 WIB, mengatakan bahwa:

“kalau masalah sumber daya manusia dapat dilihat sendiri cukup lah, tetapi masih sangat-sangat banyak kekurangan, semua masih terbatas, tetapi dulu pernah dibuatkan ruangan tetapi dari pihak BPKepnya tidak pernah ada yang ngantor jadi sekarang ruangnya disatukan untuk apapun itu urusan kepenghuluan, BPKep kalau mengadakan rapat ruangnya ya disini di kantor penghulu kita ini, semoga saja secepatnya ada lagi anggaran untuk membangun ruangan kerja dari BPKep agar pekerjaan mereka lebih efektif dan efisiensi.”

Untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, selain melakukan wawancara kepada penghulu siarang-arang penulis juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Bapak Iswanto Hasibuan pada tanggal 6 juli 2021 pukul 16:30 WIB,, adapun tanggapan beliau yaitu sebagai berikut:

”selama ini saya lihat sangat prihatin kalau ditanya sumber daya manusianya ya karna bisa kamu lihat sendiri ketidakmampuan anggota bahkan ketua BPKep sendiri pada tugasnya, mungkin bisa dikatakan kita

kerja tidak sesuai perda rohil yang mengatakan 3fungsi tersebut, bisa kamu tanyakan kepada ketua mungkin saja dia tidak pahaam sama hal itu, memang masih kurang kali kalau maslaah sdm, bisa dilihat dari tamatan kami hanya lulusan SMA saja yang tidak jauh pemahamannya jadi hanya sekedar saja, apalagi kami tidak memiliki ruang kerja atau kantor, dulu pernah kami usulkan tapi hingga saat ini belum juga ada lagi gerakan dari kepenghuluan untuk membuat kantor sebagai tempat kerja kami, selain kantor bahkan sarana prasarana kami seperti computer atau alat kerja yang mendorong agar kinerja menjadi efektif dan efesien pun tidak ada jadi ya seperti ini saja, setiap ada kegiatan bercampur didalam kantor penghulu itu, istilahnya tidak ada privasi untuk BPKep sendiri dalam hal pengarsipan hal-hal yang dianggap penting sehingga itu yang membuat kinerja kita jadi kurang maksimal untuk menjalankan fungsi penting dari bpkep itu tidak dapat berjalan baik, sama seperti yang saudara tanyakan tadi seperti program kerja atau agenda dari bpkep itu, tidak ada karna apa karena pemahamannya kurang maksudnya ya ini tadi sumber dayanya sangat-sangat lemah sehingga tidak paham akan hal seperti ini, kalau dikatakan ya harus ada namanya organisasi ya pasti memiliki program kerja tetapi itulah terkendala pada sdm yang kurang mampu untuk berfikir hal seperti ini.”

Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan dilapangan maka peneliti dapat mengetahui mengetahui beberapa informasi mengenai indikator melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwasanya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dari segi sumber daya manusia dan sarana dan prasarananya sangat kurang memadai terlihat dari tamatan seluruh keanggotaan BPKep hanyalah tamat SMA saja, dan tidak memiliki ruang kerja sendiri jadi untuk itu masih sangat kurang terlaksana lah dalam pencapaian hal tersebut.

Dari hasil uraian data tabel dan wawancara diatas serta hasil dari pengamatan peneliti dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan yaitu kurang terlaksana, hal ini ditandai dengan BPKep tidak memiliki sarana dan Prasarana untuk menunjang kinerja mereka dan sumber daya manusia yang berkompeten.

4. Siapa Yang Akan Melaksanakan

Dalam sebuah perencanaan akan ada suatu proses di mana di dalam proses tersebut merupakan rangkaian dari urutan yang rasional. Dan untuk setiap proses tersebut akan selalu di sesuaikan dengan tujuan yang di dapat dan akan di sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan dan juga yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dari setiap perencanaan akan selalu ada yang namanya pengambilan keputusan yang selaras dengan fakta-fakta yang tampak, yang sesuai pula dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan bersama. Dari pengertian pelaksanaan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk pengambilan keputusan di lakukan untuk menentukan tujuan dari sebuah proses untuk mempersiapkan semua kebutuhan dari setiap kegiatan yang sesuai dengan perencanaannya sehingga mencapai tujuan yang sudah di sepakati bersama. Maka pelaku dalam kebijakan tersebut atau yang menjalankan kebijakan itu siapa yang siap untuk melaksanakannya.

Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator siapa yang melaksanakan. Berdasarkan indikator siapa yang melaksanakan dalam penelitian ini terdapat dua sub indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya dengan cara melihat dari ketua BPKep dan anggota BPKep Untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7: Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Dalam Siapa Yang Akan Melaksanakan

No	Sub Indikator	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
1	Ketua BPKep	26	3	3	31
2	Anggota BPKep	17	12	1	31
	Jumlah	43	15	4	62
	Rata-rata	21,5	7,5	2	31
	Persentase	69%	24,6%	6,4%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Berdasarkan tabel V.7 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator siapa yang melaksanakan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Responden menjawab Terlaksana sebanyak 69%, cukup terlaksana 24,6%, dan kurang terlaksana 6,4%.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini penulis juga menyertakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada Penghulu Siarang-Arang Bapak Darmalis S.E Dan sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Siarang Arang Bapak Iswanto Hasibuan, mengenai indikator melaksanakan semua semua rencana, berikut adalah tanggapan dari penghulu siarang-arang yakni bapak Darmalis S.E pada tanggal 4 juli 2021 pukul 16:30 WIB, mengatakan bahwa:

“kalau terkait dalam membuat dan melaksanakan kebijakan Pastinya ya, Karena ketua BPKep lah yang ikut serta mengesahkan suatu kebijakan yang

dibuat, tanpa ada ketua bpkep tersebut maka kebijakan yang dibuat oleh kepenghuluan atau pun dari bpkep itu sendiri tidak lengkap jadinya.”

Untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, selain melakukan wawancara kepada Penghulu Siarang-Arang, penulis juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Bapak Iswanto Hasibuan pada tanggal 6 juli 2021 pukul 16:30 WIB, adapun tanggapan beliau yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk membuat kebijakan itu ketua emang sangat berperan penting, tapi untuk keanggotaan sendiri tergantung dengan rencana pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan apakah kami sebagai anggota diperlukan atau tidak, jika kami diperlukan untuk ikut serta maka kami akan ikut, tetapi jika tidak maka yang akan hadir dalam dalam pembuatan dan pengesahan kebijakan tersebut hanya akan dihadiri oleh bagian inti saja seperti ketua, wakil ketua dan sekretaris saja.”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapang maka peneliti dapat mengetahui beberapa informasi mengenai indikator siapa yang akan melaksanakan, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwasanya BPKep Siarang-arang dinilai Cukup Terlaksana hal ini ditandai masih jarang nya anggota BPKep hadir disaat pembahasan atau perencanaan kebijakan sehingga seperti masih ada yang kurang sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.

Dari hasil uraian data tabel dan hasil wawancara diatas serta hasil dari pengamatan peneliti dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator siapa yang akan melaksanakan yaitu Terlaksana meskipun masih terdapatnya kekurangan dari pihak BPKep tetapi BPKep akan semaksimal mungkin untuk

memperbaiki apa yang kurang sehingga dapat berjalan dengan baik tugas dan fungsinya untuk mendorong kinerja yang baik.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Melaksanakan semua rencana, kebijakan yang dirumuskan, melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, dan siapa yang akan melaksanakan. Dari 4 indikator tersebut setelah dijelaskan satu persatu kemudian dibuatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item Yang Dinilai	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Melaksanakan semua rencana	2 (6,5%)	27 (87%)	2 (6,5%)	31
2	Kebijakan yang dirumuskan	2 (6,5%)	27,5 (88,7%)	1,5 (4,8%)	31
3	Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan	1 (3,3%)	5,5 (17,7%)	24,5 (79%)	31
4	Siapa yang melaksanakan	21,5 (69%)	7,5 (24,6%)	2 (6,4%)	31
Jumlah		26,5	67,5	30	133
Rata-rata		7	16,8	7,5	31
Persentase		22%	54%	24%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Dari tabel diatas rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi badan permasyarakatan kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan siarang-

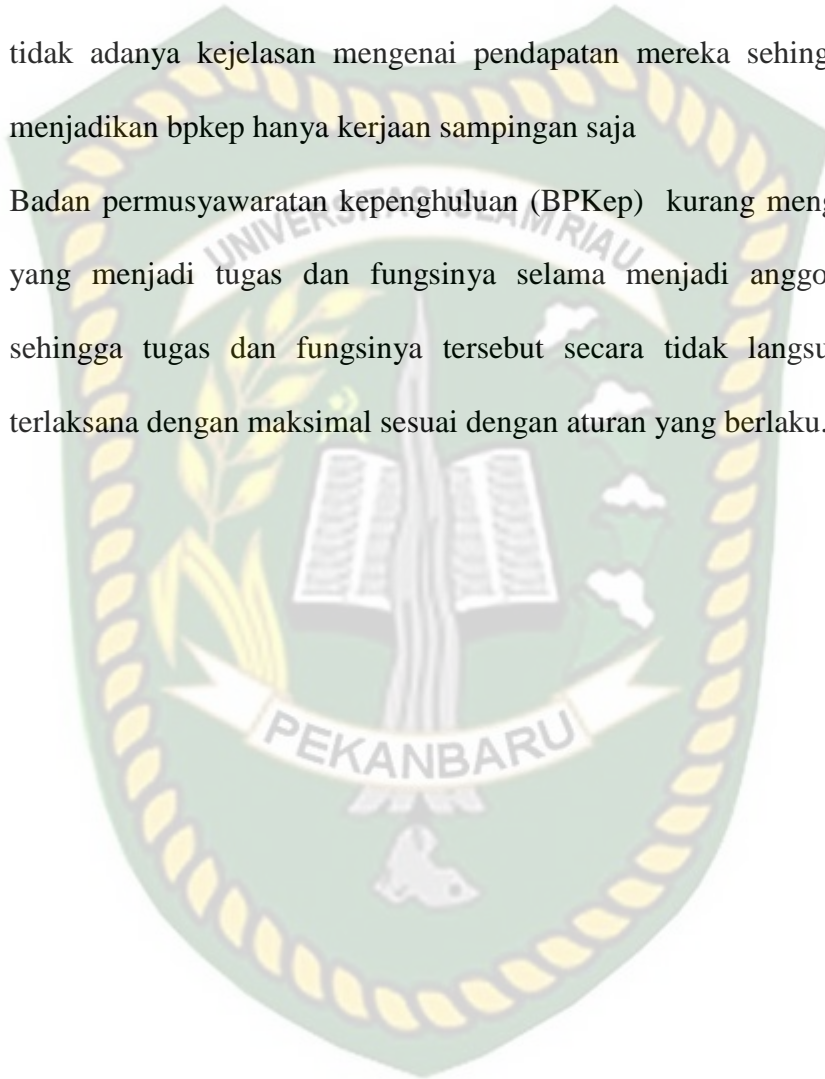
arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, dari 4 indikator yang disajikan yaitu, Melaksanakan semua rencana, kebijakan yang dirumuskan, melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, dan siapa yang akan melaksanakan yang mana masing-masing tampak jelas sesuai kategori antara lain: 7 responden atau 22% memberikan jawaban dengan kategori terlaksana, 16,8 responden atau setara dengan 54% memberikan jawaban dengan kategori Cukup Terlaksana, dan 7,5 responden atau setara dengan 24% memberikan jawaban dengan kategori Kurang Terlaksana. Dari keseluruhannya dapat disebutkan bahwa pelaksanaan fungsi BPKep terletak pada kategori cukup terlaksana yang berdasarkan jawaban responden pada kusioner penelitian. Akan tetapi dalam penelitian ini menurut peneliti masih sangat banyak sekali yang harus di perbaiki pada pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan, karena buktinya saja untuk sumber daya dan sarana dan prasarana saja belum ada bagaimana BPKep bisa untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai perda yang berlaku, agak dapat bekerja lebih efektif dan efektifitas. Dan BPKep dapat lebih mengerti dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan.

D. Faktor Penghambat pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) di kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir

- a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedia tempat atau wadah untuk berkumpulnya anggota bpkep sehingga itu juga dapat

membuat kinerja bpkep menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- b. Para anggota kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai pendapatan mereka sehingga mereka menjadikan bpkep hanya kerjaan sampingan saja
- c. Badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya selama menjadi anggota BPKep, sehingga tugas dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) di kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir berada pada kategori cukup terlaksana hal ini dilihat dari:

1. Analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) di kepenghuluan siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir yang dilihat dari 4(empat) indikator diatas yaitu:
 - a. Melaksanakan semua rencana, adapun responden yang menjawab pada kategori “ Cukup Terlaksana” sebanyak 87% dari 31 responden, adapun alasan responden yaitu Karena responden merasa dalam melaksanakan rencana, BPKep masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki seperti pada rapat yang diadakan masih jarang ikut serta dengan berbagai alasan sehingga belum tertelaksana dengan baik semua.
 - b. Kebijakan yang dirumuskan adapun responden yang menjawab pada kategori “cukup terlaksana” sebanyak 90% dari 31 responden , adapun alasan responden ialah karena BPKep masih belum menjalan fungsinya dengan baik, karna dapat dilihat dari pelaksanaan membuat program kebijakan atau kegiatan bahkan agenda dan pengarsipan yang diperlukan tidak berjalan baik sebagai mana mestinya.

- c. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan merupakan komponen yang meliputi jumlah staf dan kualitas mutu guna untuk melaksanakan sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan oleh BPKep dalam melaksanakan fungsinya. Adapun responden yang menjawab pada kategori “kurang terlaksana” sebanyak 81% dari 31 responden adapun alasan responden menjawab kurang terlaksana ialah dari segi sumber daya manusia dan sarana dan prasarannya sangat kurang memadai terlihat dari tamatan seluruh keanggotaan BPKep hanyalah tamat SMA saja, dan tidak memiliki ruang kerja sendiri jadi untuk itu masih sangat kurang terlaksana lah dalam pencapaian hal tersebut.
- d. Siapa yang melaksanakan, adapun responden yang menjawab pada kategori “Terlaksana” sebanyak 71% dari 31 responden, adapun alasan responden menjawab terlaksana meskipun masih terdapatnya kekurangan dari pihak BPKep tetapi BPKep akan semaksimal mungkin untuk memperbaiki apa yang kurang sehingga dapat berjalan dengan baik tugas dan fungsinya untuk mendorong kinerja yang baik.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai masukan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya dari Badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) dan pemerintah kepenghuluan memiliki rencana anggaran yang khusus dapat untuk membangun kantor BPKep jika diperlukan itu agar BPKep dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan benar.
2. Kepada pemerintah kepenghuluan agar lebih di perbaiki lagi dari sistem penganggaran untuk ketepatan waktu, agar tidak adanya keterlambatan dalam pengeluaran pendapatan gaji terkhusus kepada BPKep tersebut
3. Kepada ketua dan anggota badan permusyawaratan kepenghuluan(BPKep) seharusnya lebih mengerti dan paham terhadap tugas dan fungsi yang telah menjadi acuan yang ada dalam perda rohil no 11 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep) agar ketua dan anggota dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
4. Terdapat Indikator melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan kurang terlaksana, maka dapat dikatakan sumber daya manusianya harus diperhatikan sehingga dapat untuk mengelola fungsi dari BPKep itu agar anggota dapat memahami dengan jelas tugas dan fungsinya sehingga untuk mendorong kinerja yang baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, & Westra . (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Affifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan* . Bandung: Alfabeta .
- Agustino , L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta .
- Ali, F. (2011). *teori dan konsep administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badrudin. (2013). *Dasar-dasar Manajemen* . Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia .
- Dewi , I. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi* . Surabaya: Prestasi Pustaka .
- Emron , Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung: Alfabeta .
- Hanim, S. (2005). *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru : Uir Press.
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: PT. Bumi Aksara .
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamsir. (2014). *Kewirausahaan* . Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan , E. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana .
- Mangku Negara , A. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung: Resdakarya.
- Musanef. (2009). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* . Jakarta: CV Haji.
- Nasucha, C. (2010). *Reformasi Administrasi Publik* . Jakarta : PT. Grasindo .
- Novitasari, E. (2017). *Pengantar Manajemen* . Yogyakarta : PT. Anak Hebat Indonesia .
- Pasolong , H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Alfabeta .

- Pasolong , H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Rumanti , M. (2002). *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik* . Jakarta : PT. Grafindo.
- Siagian , S. (2006). *Administrasi Pembangunan* . Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, S. (2003). *Filsafat Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Siagian, S. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinembela , P. L. (2005). *Reformasi Pelayanan Publik* . Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2013). *Pengantar Manajemen* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus , M. (2009). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD Press.
- Sondang P, S. (2014). *Administrasi Pembangunan* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Peneleitian Manajemen* . Bandung: Alfabeta .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sule , E. T., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen* . Jakarta : Kencana .
- Sunyoto, D. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutarto. (2008). *Dasar-Dasar Organisasi* . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Suwanto . (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* . Bandung: Alfabeta .
- Syafi'i, I. (2003). *Ilmu Administrasi Publik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri , W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik* . Jakarta: Erlangga.
- Terry, G. (2012). *Dasar-dasar Manajemen. Cetakan ke XIII*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Winardi. (2010). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Gramedia.
- Zulkifli , & Nurmasari . (2015). *Fungsi-Fungsi Manajemen* . Pekanbaru: UIR Press .
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* . Pekanbaru: UIR press.
- Zulkifli. (2009). *Fungsi-fungsi Manajemen* . Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli. (2013). *Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Zulkifli, & Yogya , A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumen:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang: *Badan Permusyawarat Kepenghuluan*